

Glosarium

Absolut	Mutlak; tak terbatas
Adendum	Sisipan, yang berarti naskah perubahan UUD 1945 diletakan melekat pada naskah asli UUD 1945.
Atheis	Tidak mengakui adanya Tuhan.
Demokratisasi	Pendemokrasian
Diktaktor	Kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan mutlak, terutama diperoleh melalui cara kekerasan atau tidak demokratis
Ideologi doktriner	Ideologi yang ajaran-ajarannya dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah
Ideologi pragmatis	Ideologia yang jaran-ajarannya tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideology itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, system pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan system politik, serta pelaksanaannya tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerinyah melainkan dengan pengaturan pelembagaan (<i>internalization</i>)
Ideologi	Kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.
Kabinet	Badan atau dewan pemerintahan yang terdiri para menteri
Kedaulatan rakyat	Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kelompok separatis	Kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara
Konstituante	Lembaga atau badan pembentuk konstitusi atau UUD.

Konstitusi fleksibel	Sifat konstitusi yang mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan dapat diubah dengan cara yang tidak sulit.
Konstitusi rigid	Sifat konstitusi yang sulit menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan cara merubahnya melalui cara khusus atau istimewa seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak.
Konstitusi tertulis	Suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen atau naskah formal.
Konstitusi tidak tertulis	Suatu konstitusi apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam suatu dokumen tertentu, melainkan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.
Konvensi ketatanegaraan	Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Monarki absolut	Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang raja, yang berkuasa mutlak
Negara Serikat	Negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian.
Otoriter	Berkuasa sendiri; sewenang-wenang
Philosofische Grondslag	Dasar Falsafah Negara, suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara
Reformasi	Perubahan radikal untuk perbaikan suatu masyarakat atau negara
Rule of law	Kekuasaan hukum; hukum yang berkuasa
Sistem Parleментар	Sistem pemerintahan yang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahannya berada di tangan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen.
Sistem pemerintahan	Suatu kesatuan berbagai komponen pemerintah untuk memerintah.